



## Pengusutan Dugaan Bansos Fiktif Terkesan Lamban

SEMARAPURA, NusaBali

Kasus dugaan bantuan sosial (Bansos) fiktif pembangunan merajan Sri Arya Kresna Kepakisan, di Banjar Anjingan, Desa Pakraman Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung dengan audit Rp 200 juta sudah men-cuat sejak Maret 2016 lalu. Namun empat bulan berlalu hingga memasuki pertengahan Juli 2016 ini, polisi belum juga menetapkan tersangka.

Padahal penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi, mulai dari kalangan bawah, yakni nama-nama yang tercantum di proposal maupun memeriksa sejumlah pejabat di Pemkab Klungkung. "Ketika tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) turun sudah jelas-jelas tidak ditemukan ada proses pembangunan merajan tersebut. Tetapi kenapa pengusutannya terkesan lamban," ujar seorang warga Klungkung yang enggan disebutkan namanya. Bansos pembangunan merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Desa Pakraman Getakan dalam proposal tercantum ketua panitia, I Ketut Krisnia Adiputra. Bansos senilai Rp 200 juta tersebut difasilitasi oleh anggota DPRD Klungkung

dari Fraksi Gerindra, I Wayan Kicen Adnyana, yang notabene ayah Krisnia Adiputra.

Kasus ini terungkap setelah dilakukan monev oleh Tim Kesra Klungkung dan pihak BPKP, Senin (1/3) lalu. Monev tersebut untuk mengecek realisasi fisik. Dari sana terungkap kalau proposal itu diduga fiktif, karena tidak ada proses pembangunan merajan tersebut.

Sementara Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Wiastu Andri Prajitno mengatakan kasus bansos tersebut, kini tengah masuk dalam audit di BPKP, terkait adanya indikasi kerugian negara. "Kita masih menunggu hasilnya untuk pengembangan lebih lanjut," tegas Kasat Prajitno.

Dikonfirmasi terpisah, Kasi Pid-sus Kejari Klungkung, Made Pasek Budiawan mengatakan, kasus tersebut tengah diusut oleh penyidik di Polres Klungkung. Kata dia, sesama instansi penegak hukum jika memang itu sudah ditangani, tentu tidak etis jika pihaknya turut mengusut. "Kita tidak ada kewenangan untuk itu," ujar Pasek. Sementara Ketua DPRD Klungkung, I Wayan Baru mengatakan, pihaknya menyerahkan kasus tersebut kepada aparat penegak

hukum. Yang jelas anggotanya dalam hal ini hanya memfasilitasi saja. "Mengenai layak atau tidaknya memperoleh bantuan, tentu diproses dari eksekutif," ujarnya.

Kasus bansos fiktif ini sendiri terungkap ketika Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pemkab Klungkung turun bersama BPKP ke lokasi, Selasa (1/3) lalu. Kala itu, Tim Monev yang melakukan pengecekan, menemukan sejumlah kejanggalan di lokasi. Salah satunya, Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan yang digelontorkan bansos/hibah sebesar Rp 200 juta tahun 2015, ternyata tidak ada di Banjar Anjingan, Desa Pakraman Getakan.

Setelah ditelusuri, nama-nama yang tercantum dalam proposal tertanggal 18 Juli 2014 itu, sama sekali tidak mengetahui kalau namanya dicantumkan.

Dalam proposal hibah dengan nomor 01/PPMSAKK/VII/2014 itu, tercantum I Ketut Krisnia Adiputra sebagai Ketua Panitia Pembangunan. Dia merupakan krama asal Banjar Anjingan, Desa Pakraman Getakan yang kesehariannya bekerja sebagai pegawai kontrak di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Klungkung.  w

Edisi : Rabu, 20 Juli 2016

Hal : 5



## Pemkab Bangli Alokasikan Rp 530 Juta untuk Paskibra

BANGLI, NusaBali

Pemkab Bangli mengalokasikan anggaran Rp 530 juta untuk rekrut dan pembentukan pasukan pengibar bendera (Paskibra) dalam rangka HUT ke-71 Kemerdekaan RI (17 Agustus 2016) yang akan datang. Alokasi anggaran tersebut, hanya mampu untuk merekrut 40 orang personel paskibra. Jumlah tersebut tentu saja kurang dari yang diharapkan sebanyak 80 orang. Untuk menyaingi kekurangan personel tersebut, Pemkab Bangli menyertakan anggota Purna Paskibra (Purna Paskibra Indonesia/PPI) tahun sebelumnya.

"Dibanding dengan daerah lain anggaran kita memang kecil," ujar Kasubag Kesatuan Bangsa, Politik, dan Pemberdayaan Masyarakat Pemkab Bangli I Nengah Karya Atmaja, Senin (18/7).

Menurut Karya Atmaja, dari informasi yang dia dengar di daerah lain anggaran untuk paskibra sampai Rp 1 miliar. Meski demikian, dengan menyertakan para mantan

paskibra sebelumnya atau purna paskibra, kekurangan personel paskibra bisa tertutupi. "Seragam para paskibra sebelumnya masih utuh," kata Karya Atmaja.

Karenanya tidak dilakukan pengadaan seragam untuk para mantan/purna paskibra. Mereka masih bisa memanfaatkan seragam yang mereka terima tahun sebelumnya. Menurut Karya Atmaja, pola yang sama juga diberlakukan pada HUT ke-70 Kemerdekaan RI tahun 2015 lalu, yakni melibatkan para mantan purna paskibra, karena keterbatasan anggaran.

Perekrutan personel Paskibra Bangli dilakukan, Kamis (14/7). Para personel paskibra berasal dari SMA/SMK di seluruh Bangli. "Setiap sekolah ada perwakilannya," kata Karya Atmaja. Pelatihan mulai 27 Juli mendatang di Lapangan Umum Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli. Personel Paskibra akan ditempa dengan latihan mental dan fisik, oleh pelatih dari Kodim 1626 Bangli dan Polres. **k17**

Edisi : Rabu, 20 Juli 2016  
Hal : 8



## Ngadat, Tunjangan Sertifikasi Guru

BANGLI, NusaBali

Kalangan guru di Bangli mengeluh lantaran tunjangan sertifikasi yang tak kunjung cair, selama dua triwulan. Sementara di daerah lain, mereka mengaku mendapat informasi dana sertifikasi telah cair.

Meski demikian, para guru berharap agar dana tunjangan sertifikasi segera bisa direalisasikan. Apalagi, para guru sudah mengikuti semua proses dan tahapan sertifikasi, termasuk yang terakhir menandatangani amprah pencairan. "Kami sangat membutuhkan hak kami, untuk menunjang keluarga. Apalagi sekarang tahun ajaran baru, banyak perlu biaya untuk sekolah anak," ucap seorang guru.

Disdikpora Bangli tidak menampik adanya keluhan terkait tunjangan sertifikasi yang belum cair. Namun demikian, dana tunjangan sertifikasi diyakini akan segera bisa dicairkan. Hal itu karena administrasi pencairan tersebut, sebagian sedang dalam proses amprah dan sebagian lagi masih dalam proses verifikasi.

"Untuk tingkat TK dan SD sedang dalam proses amprah. Sedang untuk SMP, SMA/SMK masih proses veri-

fikasi," ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga I Nyoman Sedana yang dihubungi terpisah, Selasa (19/7). Dari proses verifikasi tersebut, sebagian sudah ada yang selesai.

Dijelaskan Sedana, verifikasi dilakukan setiap tahun, bertujuan mengecek keabsahan penerima. Dari pengecekan tersebut bisa saja guru yang tahun sebelumnya menerima tunjangan sertifikasi, namun berikutnya tak lagi menerima, karena kekurangan jam mengajar. Dikatakannya, verifikasi tersebut merupakan permintaan pusat. Pencairan dilakukan per triwulan sekali.

"Begitu proses verifikasi tuntas, maka tunjangan langsung diterima melalui rekening guru penerima," jelas mantan Kepala SMKN 1 Susut, ini.

Sedana menyatakan, pihaknya berharap begitu proses verifikasi selesai langsung dibayarkan kepada guru penerima. Dia mengaku belum bisa memberi data pasti berapa jumlah guru yang 'ngadat' administrasinya. "Saya masih di jalan ini usai rapat di Denpasar," kata Sedana. Namun, dia tak mengelak jumlah lebih dari seribu orang guru. **k17**

Edisi : Rabu, 20 Juli 2016

Hal : 8



## Lapangan Tenis di GOR

### Segera Diperbaiki

AMLAPURA, NusaBali

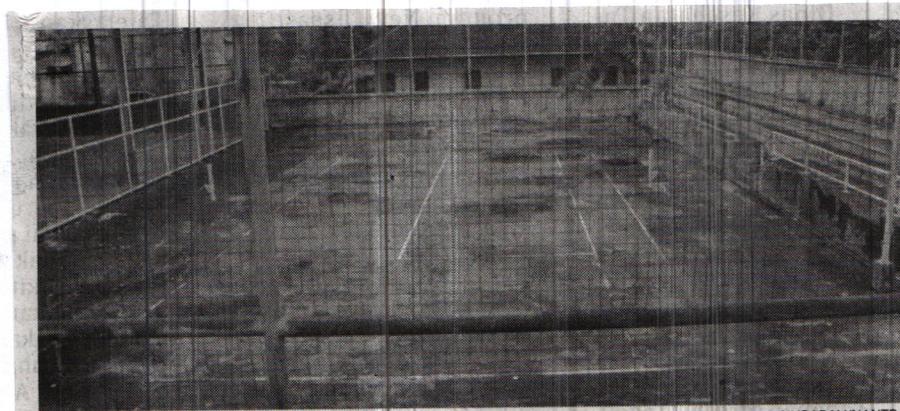
Setelah diprotes pecinta tenis di Karangasem, pihak Disdikpora Karangasem segera membenahi lapangan tenis di kompleks GOR Gunung Agung Amlapura. Sebab dua lapangan tenis di Lapangan Candra Bhuana Amlapura terlanjur dibongkar untuk pembangunan kota pusaka.

Kepala Bidang Pendidikan Non Formal Pemuda Olahraga Disdikpora Karangasem I Made Subawa, menegaskan, perbaikan lapangan tenis GOR Gunung Agung berbiaya Rp 154 juta segera terealisasi tahun 2016. "Tahun ini anggaran itu terealisasi untuk memperbaiki satu dari dua lapangan tenis

yang ada. Anggaran yang lain untuk pengadaan lapangan voli dan basket out door," kata Subawa di Amlapura, Selasa (19/7).

Rencana tahun 2017, kembali membangun minimal satu lapangan tenis, sebagai pengganti dua lapangan yang dibongkar di Lapangan Candra Bhuana.

Satu hal lagi yang menyulitkan para pecinta tenis, jika lapangan tenis di GOR Gunung Agung tuntas diperbaiki. Sebab, posisi lapangan menghadap ke timur - barat, nantinya pemainnya menantang sinar matahari. Mestinya lapangan tenis melintas utara - selatan, sehingga terhindar dari sorotan matahari. **k16**



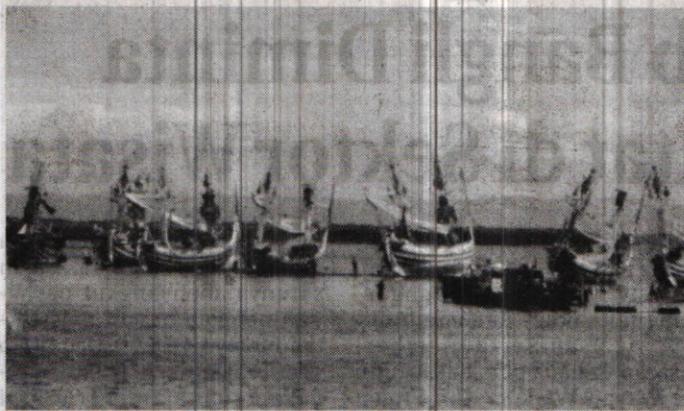
LAPANGAN tenis di GOR Gunung Agung yang selalu teraliri air got, ini segera diperbaiki. ● NUSABALI/NANTRA

Edisi : Rabu, 20 Juli 2016

Hal : 8



## Hampir 2 Tahun Mangkrak, ✓ Kapal Keruk Kembali Beroperasi



• NUSABALI/IB DIWANGKARA

Kapal keruk kembali dioperasikan di PPN Pengambengan, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Jembrana, Selasa (19/7).

NEGARA, NusaBali

Hampir dua tahun mangkrak, kapal keruk atau dredger di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Jembrana kembali dioperasikan. Kapal keruk senilai Rp 22.186.186.000 itu masih melalui uji efektivitas. Pengujian dimaksudkan mengetahui kemampuan dan biaya pemeliharaan kapal keruk.

Kasubag TU PPN Pengambengan Kadek Adi Candra mengatakan, kapal keruk tipe IMS 7012 bantuan Pemerintah Pusat tahun 2014 itu sebelumnya hanya sempat beroperasi sekitar 4 bulanan. Pengoperasian yang tergolong cukup singkat itu akibat kendala tek-

nis bagian mesin yang harus menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Penyelesaian kendala itu dilakukan dengan mengajukan permohonan perbaikan ke pusat. "Sebenarnya sudah direncanakan tahun ini. Cuma, dengan kunjungan Ibu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan), bisa menjadi lebih segera," ungkap Adi Candra, Selasa (19/7).

Dikatakan, selang dua minggu setelah kunjungan Menteri Susi, kapal keruk langsung dioperasikan. Dalam pengoperasiannya masih berusaha diuji efektivitasnya. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui fungsi maupun kemampuan kapal keruk untuk pemeliharaan ke dalam kolam labuh di PPN Pengam-

bengan yang kini mengalami pendangkalan. Hasil pengujian akan dijadikan bahan laporan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. "Sudah kami buat kan bak penampungan. Jadi sejauh mana kemampuannya, nanti kami laporkan lagi ke atas," tambah pria asal Buleleng ini.

Disinggung kedalaman kolam labuh di PPN Pengambengan, katanya, tergantung kondisi arus. Ketika arus normal, terjadi minus 0,5 meter. Ketika arus pasang, bisa minus hingga 1 meter. Sedangkan ketika surut, semakin dangkal. "Perbandingan kedalaman antara pasang surut, kami memang tidak bisa mengukur secara pasti. Tetapi, kalau melihat kondisi di lapangan, ketika terjadi pasang, kapal bisa rata dengan dermaga. Tetapi kalau surut, kering jauh sekali," ujarnya.

Sasaran ke depan, kolam labuh di PPN Pengambengan diharapkan bisa menjadi tempat tambatan kapal berukuran raksasa hingga berkapasitas 30 ton yang rata-rata memiliki draft kapal setinggi 2 meter. "Kalau ideal sebenarnya, buat melayani kapal-kapal besar, paling tidak kedalaman minus 3 meter. Tetapi, kalau mencari ideal itu, tentu perlu proses. Disesuaikan mana yang menjadi prioritas, karena se-Indonesia," ungkapnya. ode



## Dugaan Korupsi Perdin DPRD Denpasar Lagi, Sekwan dan Dua Anggota DPRD Diperiksa

DENPASAR, NusaBali

Satu per satu anggota DPRD Kota Denpasar yang diduga terlibat dalam Perjalanan Dinas (Perdin) DPRD Kota Denpasar pada tahun 2013 diperiksa penyidik Kejari Denpasar. Kali ini giliran dua anggota Fraksi Demokrat, yaitu AA Susruta Ngurah Putra dan Ketut Arya Saputra (mantan anggota DPRD Kota Denpasar) yang diperiksa pada, Selasa (19/7). Selain itu, Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Denpasar, IGN Rai Suta juga ikut diperiksa.

Pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 13.00 Wita ini dipimpin langsung Kasi Pidsus Kejari Denpasar, I Wayan Sutarjana. Informasi yang dihimpun, pemeriksaan paling lama dilakukan terhadap Sekwan, IGN Rai Suta. "Dia (Rai Suta, red) diperiksa paling lama sekitar 3 jam," jelas sumber yang enggan disebutkan namanya ini.

Rai Suta yang menjabat sebagai Sekwan merupakan kuasa pengguna anggaran dalam perjalanan dinas DPRD Kota Denpasar. Ia diduga mengetahui bagaimana proses Perdin dilakukan serta anggaran yang digunakan dalam rangka Perdin. "Pada 2013 anggaran perjalanan dinas mencapai Rp 6 miliar. Ini yang fokus ditelusuri penyidik karena diduga banyak penyimpangan," beber sumber.

Selain Rai Suta, penyidik juga memeriksa anggota DPRD AA Susruta Ngurah Putra dan Arya Saputra. Penyidik juga memeriksa seorang staf Sekwan DPRD Kota Denpasar, Nyoman Juana yang merupakan mantan ajudan Ketua DPRD Kota Denpasar, Ketut Darsa yang sudah meninggal dunia.

Kasi Intel dan Humas Kejari Denpasar, Syahrir Sagir men-

gatakan pemeriksaan yang dilakukan merupakan lanjutan dari pemeriksaan sebelumnya. Ia mengatakan masih ada beberapa anggota DPRD Kota Denpasar yang akan diperiksa. "Ya tadi memang ada pemeriksaan lanjutan," ujarnya ketika ditemui.

Terkait pemeriksaan Sekwan, Rai Suta yang paling lama, Syahrir mengatakan itu merupakan hal yang wajar. Apalagi posisinya sebagai atasan aparatur sipil negara di sekretariat DPRD Denpasar. Syahrir menyebut pemeriksaan lebih banyak kepada peran sekwan dalam agenda perjalanan dinas.

"Sebagai pejabat tinggi di sekretariat DPRD Kota Denpasar, hampir semua anggaran yang digunakan atas izin serta pengetahuan Sekwan. Kalau sekwan tidak tandatangan, dananya kan tidak bisa cair," pungkasnya. Namun Syahrir tidak mau berandai-andai terkait tambahan tersangka baru. Pasalnya penetapan tersangka tambahan masih akan menunggu hasil penyidikan yang segera rampung. Ia memastikan, semua pihak yang terlibat akan diproses secara hukum, termasuk pihak travel.

"Kami tidak akan tebang pilih. Yang terlibat pasti diproses," pungkas Syahrir yang juga penghobi mobil tua ini. Dalam kasus ini, penyidik sudah menetapkan satu tersangka, yaitu PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) berinisial AAP. Sementara saat dikonfirmasi soal pemeriksaan dirinya melalui sambungan telepon semalam, Sekwan DPRD Denpasar, AAN Rai Suta tak mau banyak komentar. "Saya sedang ada acara ini, besok saja ya ketemu di kantor," katanya singkat. **rez**

Edisi : Rabu, 20 Juli 2016

Hal : 5



## DPRD Ingin Honor Guru Kontrak Setara UMK'

SINGARAJA, NusaBali

Pemkab Buleleng telah putuskan mengangkat 1.000 guru abdi tingkat sekolah dasar (SD) menjadi guru kontrak pada tahun 2016. Namun kini muncul keinginan agar honor guru kontrak dinaikkan setara dengan upah minimum kabupaten (UMK) Rp 1,8 juta per orang tiap bulan.

Keinginan itu disampaikan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng, I Putu Tirta Adnyana karena menilai honor guru kontrak yang tertuang dalam APBD masih dibawah UMK, Rp 1 juta perbulan. Dikatakan, upaya penambahan guru dengan

mengangkat guru abdi sebagai guru kontrak adalah kebijakan yang tepat. Hanya saja, ia minta agar pemerintah bisa memperhatikan tingkat kesejahteraan para guru kontrak. Karena beban tugas guru kontrak hampir sama atau bahkan lebih berat dibandingkan guru PNS itu sendiri. "Peran guru kontrak sangat membantu dalam mengatasi krisis guru PNS yang terjadi sekarang ini. Kita perlu memberikan perhatian lebih agar mereka bersemangat dalam mengabdikan di daerah, sehingga gaji mereka patut kita sesuaikan dengan ketetapan UMK," kata politisi Partai

Golkar asal Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula ini.

Menurut Tirta Adnyana, peningkatan honor tersebut juga sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pengabdian guru kontrak tersebut yang ikut menciptakan generasi bangsa. Disamping itu, langkah tersebut juga memotivasi agar guru kontrak lebih bertanggungjawab dalam tugas-tugasnya. "Saya kira dengan penghargaan yang layak ini kawan-kawan guru kontrak ini bisa lebih maksimal dalam melaksanakan tugasnya dan pada akhirnya nanti pembangunan di sektor

pendidikan pun menjadi optimal," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Buleleng Gede Suyasa mengatakan, untuk saat ini pemerintah fokus menambah guru kontrak. Terkait besaran honor saat ini mengacu dengan ketentuan yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Selain itu, pertimbangan yang paling penting adalah anggaran yang tidak mencukupi jika besaran gaji guru kontrak mengikuti ketetapan UMK.

Dia mencontohkan, menyusul pengangkatan 1.000 guru kontrak tahun ini pemerintah memerlukan anggaran seki-

tar Rp 3,5 miliar. Belum lagi untuk membayar gaji guru kontrak yang sudah direkrut tahun-tahun sebelumnya. Jika sekarang gaji mereka disesuaikan dengan UMK, maka untuk 1.000 guru kontrak yang baru diangkat saja anggaran yang diperlukan mencapai Rp 6 miliar. "Kita fokus dulu penambahan jumlah guru kontrak. Besaran gaji tetap mengikuti kebijakan lama yakni Rp 1 juta per bulan. Pertimbangan bukan karena regulasi yang tidak mendukung untuk membayar gaji dengan UMK, tetapi pagu anggaran yang tidak memungkinkan," jelasnya. **k19**

Edisi : Rabu, 20 Juli 2016

Hal : 4